

PERAN BUYA GUSRIZAL GAZAHAR DI MAJELIS ULAMA INDONESIA SUMATRA BARAT

Johan Septian Putra, Nadia Oktaviadi

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, UIN Imam Bonjol Padang

Email: 20201021011@student.uin-suka.ac.id

Kata kunci

*Kontribusi, Buya
Gusrizal, MUI Sumbar*

Abstrak

Pada masa kepemimpinan Buya Gusrizal Gazahar, MUI Sumatra Barat memahami pergolakan dan perubahan sosial masyarakat. Masa kepemimpinannya di Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Barat memberikan perubahan bagi masyarakat Sumbar termasuk perannya dalam mengikuti permasalahan isu-isu sosial, politik dan agama di lingkungan masyarakat. Tujuan penelitian ini yakni mendeskripsikan awal pembentukan Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat, mendeskripsikan biografi dan gaya kepemimpinan dari Buya Gusrizal Gazahar di Majelis Ulama Indonesia Sumatra Barat dan menjelaskan Kontribusi Buya Gusrizal Gazahar sebagai ketua Majelis Ulama Indonesia Sumatra Barat. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Hasil penelitian dalam artikel ini, yaitu pertama, majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat telah terbentuk sebelum pendirian Majelis Ulama Indonesia Pusat. Kedua, Buya Gusrizal Gazahar merupakan seorang cendekiawan dalam ilmu keagamaan Islam karena keluarga dan lingkungannya adalah lingkungan religius dan akademis hingga ia menyelesaikan studi masternya. Gaya kepemimpinan Buya Gusrizal Gazahar dinilai prestisius dalam Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat, karena ia memiliki sifat tegas, konsisten, jujur, cerdas dan responsif dalam kepemimpinannya di Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat. Ketiga, kontribusinya bagi MUI Sumbar memberikan dampak positif terhadap masyarakat karena ia selalu memberikan responsif dan tegas terhadap permasalahan muncul di lingkungan masyarakat.

Keywords

*Contribution, Buya
Gusrizal Gazahar,
Indonesian Ulama
Council of West
Sumatra*

Abstract

The West Sumatra MUI during the leadership of Buya Gusrizal Gazahar understood social upheaval and change as change. His tenure at the Indonesian Ulama Council (MUI) of West Sumatra brought changes to the people of West Sumatra, including his role in following social, political and religious issues in the community. The purpose of this study is to describe the early formation of the West Sumatran Indonesian Ulema Council, to describe the biography and leadership style of Buya Gusrizal Gazahar at the Indonesian Ulama Council of West Sumatra and to explain

the contribution of Buya Gusrizal Gazahar as chairman of the Indonesian Ulama Council of West Sumatra. This type of research is descriptive using a qualitative approach. Descriptive research is research directed at providing symptoms, facts or events systematically and accurately, regarding the characteristics of a particular population or area. The results of the research in this article, namely first, the Indonesian Ulama Council of West Sumatra was formed before the establishment of the Central Indonesian Ulama Council. Second, Buya Gusrizal Gazahar is a scholar in Islamic religious science because his family and environment are religious and academic environments until he completes his master's studies. Buya Gusrizal Gazahar's leadership style is considered prestigious in the Indonesian Ulama Council of West Sumatra, because he is firm, consistent, honest, intelligent and responsible in his leadership at the Indonesian Ulama Council of West Sumatra. Third, his contribution to the Indonesian Ulama Council of West Sumatra has a positive impact on the community because he is always responsive and firm to problems that arise in the community.

Pendahuluan

Agama dianggap mampu saling mempengaruhi dengan kenyataan sosial di sekitarnya. Agama sebagai unit independen memiliki penentuan terhadap pola perilaku manusia dan bentuk struktur sosial bagi penganutnya kemungkinan cukup tinggi. Ajaran agama (aspek kultural dan agama) memiliki faktor pendorong atau bahkan penahan bagi proses terjadinya perubahan yakni proses penggugah kemantapan struktur dan persoalan pemberlakuan nilai-nilai agama.¹ Agama Islam sendiri memiliki satu bagian penting era kontemporer dalam lingkungan masyarakat yakni peran dari ulama. Ulama memiliki fungsi sentral dalam mengatasi setiap permasalahan terjadi di lingkungan sekitarnya. Ulama menekankan otoritas mempunyai 'kreativitas sejarah' yaitu mereka mampu melaksanakan *transformasi* dan *transendansi* dalam kemajuan peradaban. Oleh karena itu, pada hakikatnya, mereka adalah orang hidup dalam iman dan pikiran selalu berjuang melawan *formalisme* dan *strukturalisme* keberagamaan. "*Formalisme*" ialah suatu bentuk penghayatan agama yang menempatkan iman hanya sebatas kegiatan rutinitas ritual. Sementara itu, penekanan "*strukturalisme*" Islam mensucikan tradisi telah mematikan ruh pencarian *Ijtihad* untuk menghidupkan inovasi, kreativitas, dan perubahan setiap masanya.² Eksistensi suatu wadah dapat menampung, menghimpun dan mempersatukan pendapat-pendapat dan pikiran-pikiran dari para ulama di Indonesia bernama Majelis Ulama Indonesia. Wadah ini ditujukan agar partisipasi ulama dapat dihimpun dan mempunyai tempat khusus dalam masyarakat untuk pembangunan dapat dilakukan peningkatan.³ Upaya mewujudkan wadah eksistensi penerapan gagasan dari para ulama Indonesia tersebut telah lama dirintis melalui pertemuan-pertemuan resmi seperti musyawarah atau konsultasi-konsultasi. Awal perwujudan mulai dilakukan setelah konsensus bersama pada Loka Karya Mubaligh se-Indonesia diselenggarakan oleh pusat Da'wah Islam Indonesia pada 26-29 November 1974. Konsensus tersebut menyatakan untuk memelihara dan membina kontinuitas partisipasi umat Islam terhadap pembangunan, maka diperlukan lembaga seperti

¹ Tamrin Kamal, *Purifikasi Ajaran Islam Pada Masyarakat Minangkabau* (Padang: Angkasa Raya, 2006), h. 28-29.

² Imdadun Rahmad, *Islam Pribumi Mendialogkan Agama Membaca Realitas* (Jakarta: Erlangga, 2003), h. 1.

³ Husein Segaf, *Ulama dan Pembangunan*, (Jakarta: 1976), h. 11.

Majelis Ulama. Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah wadah untuk mempersatukan ulama-ulama seluruh Indonesia. Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat berdiri pada tahun 1968 di Bukittinggi.⁴ Namun, MUI pusat berdiri pada tahun 1975 berdasarkan susunan hasil musyawarah nasional pertama dilaksanakan pada 21 Juli 1975 di Jakarta dengan ketua umum pertama yakni Buya Hamka.⁵ MUI Sumatra Barat masa kepemimpinan Buya Gusrizal Gazahar memahami pergolakan dan perubahan sosial seperti perubahan. Masa kepemimpinannya di Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Barat memberikan perubahan bagi masyarakat Sumbar termasuk perannya dalam mengikuti permasalahan isu-isu sosial, politik dan agama di lingkungan masyarakat. Buya Gusrizal Gazahar merupakan ketua Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat dilantik pada 11 maret 2016 dalam periode 2015-2020. Ia juga mengasuh pengajian “*al Nadwah li’ Izzat al-Islam*” di Bukiktinggi. Buya Gusrizal dikenal sangat gigih dalam program “*baliak basurau*” merupakan hasil dari gagasannya. Perwujudan gagasannya tersebut telah dimulainya melalui Surau Gusrizal Gazahar berada di jalan Bypass Loweh, Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi. Surau tersebut dibangun atas kerjasama jamaah telah lama bersamanya yakni sejak tahun 2003. Buya Gusrizal juga dikenal sebagai ulama tegas dalam kepemimpinannya seperti penegasan keharaman untuk memilih partai dan siapapun pihak diusung oleh partai yang menolak Peraturan Daerah berlandaskan agama, termasuk Perda Syariah. Hal tersebut didapatkan sebelum pergelaran Pemilu 2019. Partai Solidaritas Indonesia menyatakan dalam kampanye politiknya di Medan bahwa mereka menolak terhadap perihal produk hukum atau aturan-aturan atas landasan agama. Buya Gusrizal memberikan respons ‘perlawanan’ melalui akun facebooknya terhadap pernyataan Ketua Umum PSI, Grace Natalie, menolak eksistensi Perda Syariah yang dianggap tidak sesuai di Indonesia. Buya Gusrizal menghimbau agar umat di wilayah Sumatera Barat tidak memilih kader dari partai semacam itu.⁶ Berdasarkan latar belakang masalah di atas sehingga menarik untuk dilakukan kajian lebih lanjut terkait sosok Buya Gusrizal Gazahar yang tegas dalam pengambilan keputusan dan juga seorang ulama tidak berpolitik praktis serta selalu siap membela umat Islam melalui jabatan sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Barat. Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan awal pembentukan Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat, mendeskripsikan biografi dan gaya kepemimpinan dari Buya Gusrizal Gazahar di Majelis Ulama Indonesia Sumatra Barat dan menjelaskan Kontribusi Buya Gusrizal Gazahar sebagai ketua Majelis Ulama Indonesia Sumatra Barat.

Literature Review

Literatur terdahulu mendekati kajian ini yakni dari Imam Masykoer Alie dengan judul *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Buku tersebut menjelaskan tupoksi dan kewajiban seorang ulama dalam pengebangan ilmu pengetahuan dari sisi ilmu agama atau ilmu umum.⁷ Buku tersebut juga mendeskripsikan mekanisme kerja bagi komisi fatwa dari Majelis Ulama Indonesia. Kemudian buku dari Irhas A. Shamad berjudul *Ulama-Ulama Syafiyah di Pentas Sosial Keagamaan Minangkabau Akhir abad 19 hingga awal abad 20* yang berkaitan dengan proses pembaharuan Islam dalam masyarakat Sumbar yang berubah

⁴ Tim Penulis Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat, *Dari Buya Datuak Palimo Kayo sampai ka Buya Datuak Palimo Basa Cattan Biografi Ketua-Ketua Majelis Ulama Sumatera Barat* (Padang: MUI Sumatera Barat), h.12.

⁵ Sarwan, *Trilogi Dakwah Hamka* (Padang : Imam Bonjol Press, 2015), h. 84

⁶ <https://tirto.id/waketum-mui-pernyataan-ketua-mui-sumbar-bukan-sikap-lembaga-dagq>

⁷ Imam Masykoer Alie, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Dapertemen Agama, 2003).

dalam Aspek sosial, ekonomi, pendidikan, politik. Buku ini juga menjelaskan proses pembaharuan Islam dilakukan oleh para ulama dalam peningkatan keagamaan dalam lingkungan masyarakat.⁸

Metode

Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.⁹ Penelitian kualitatif merupakan penelitian kontekstual menjadikan manusia sebagai instrument. Penelitian kualitatif atau naturalistik merupakan penelitian datanya dinyatakan dalam keadaan sewajarnya atau seperti adanya dengan tidak mengubah data dalam bentuk simbol atau bilangan. Sedangkan menjadi objek penelitian adalah seluruh bidang atau aspek kehidupan manusia dalam segala sesuatu dipengaruhi manusia. Suasana alamiah dimaksud bahwa peneliti terjun ke lapangan atau observasi secara langsung ke lapangan dan tidak memanipulasi data. Pada penelitian ini, menemui informan untuk menanyakan dan mengikuti perannya tanpa melakukan intervensi terhadap data dan membiarkan peristiwa berjalan apa adanya.¹⁰ Metode pengumpulan data dilakukan dengan pencarian sumber-sumber sebanyak mungkin dan didapatkan sumber bentuk dalam bentuk lisan, tulisan dan *moving image*, dengan klasifikasinya ada dua: primer dan sekunder. Sumber primer yaitu langsung dengan Buya Gusrizal Gazahar serta anggota Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat, dan sumber sekunder diperoleh dari buku tentang Biografi Ketua Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat dan sejarah Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat, terbitan dari Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat. Kemudian sumber sekunder berupa tulisan dari referensi buku, artikel, jurnal, karya ilmiah yang terbit dan tidak terbit serta foto, video dokumenter dan situs internet terkait kajian dalam artikel ini.

Hasil dan Pembahasan

Awal Pendirian Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat

Pelaksanaan musyawarah nasional ulama terdiri atas perwakilan ulama dari provinsi seluruh Indonesia, perwakilan sepuluh organisasi Islam dan sejumlah ulama lainnya. Pada akhir musyawarah dibuat suatu deklarasi ditandatangani oleh 53 peserta di Jakarta (21-28 Juli 1975). Musyawarah ini menyepakati pendirian Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan ketua pertama Majelis Ulama Indonesia adalah Buya Hamka.¹¹ Setelah itu pembentukan Majelis Ulama Indonesia dilaksanakan di seluruh Indonesia termasuk Majelis Ulama Indonesia di Sumatera Barat. Namun, secara historis, Majelis Ulama Sumatera Barat berdiri terlebih dahulu dibanding Majelis Ulama Indonesia. Karena Majelis Ulama Sumatera Barat didirikan pada tahun 1968 di Birugo Bukittinggi dengan ketua pertamanya yakni Buya Datuak Palimo Kayo. Oleh sebab itu, gagasan pembentukan sebuah lembaga mawadahi para ulama justru lebih maju di daerah Minangkabau.¹² Informasi pembentukan Majelis Ulama Sumatera Barat dalam literatur dahulu tidak banyak. Hal ini disebabkan lembaga ini bersifat lokal sehingga kajian spesifik dan mandiri atau buku sendiri tentangnya masih belum ada. Majelis Ulama Sumatera

⁸ Irhash A. Shamad, *Ulama-Ulama Syafiiyah di Pentas Sosial Keagamaan Minangkabau Akhir abad 19 hingga awal abad 20* (Padang: IAIN Imam Bonjol Padang, 2013).

⁹ Adi Syah Putra, "Gaya Komunikasi Dinas Lingkungan Hidup dalam Menciptakan Kesadaran Bersih Lingkungan Masyarakat Kota Binjai", *Al-Manaj*, Vol. 01, No. 02, Desember 2021, p. 13-25, h. 22.

¹⁰ Irta Sulastri, Arifah Yenni Gustia dan Lesnita Juniati, "Penggunaan Media Sosial dalam Berdakwah, Studi terhadap Da'i di Kota Padang", *Al-Munir*, Vol. 11, No. 2, Desember 2020, p. 153-163, h. 157-158.

¹¹ Helmi Karim, *Konsep Itjihad Majelis Ulama Indonesia Dalam Pengembangan Hukum Islam* (Pekanbaru: Susqan Press, 1994), h. 1.

¹² Tim Penulis Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat, *Dari Buya Datuak Palimo...*, h. 10.

Barat, biasanya sebagai pembahasan pendukung dalam pusat studi sejarah Majelis Ulama Indonesia pusat.

Biografi Buya Gusrizal Gazahar

Buya Gusrizal Gazahar adalah seorang ulama lahir di Nagari Panyakalan, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, pada 13 Agustus 1973. Buya Gusrizal Gazahar adalah anak pertama dari tiga saudara dan satu-satunya anak laki-laki dari pasangan H. Gazahar dan Hj. Marlina. Adiknya bernama Yesi Irma Suryani dan Elfitra Yenti. Keluarganya tidak dikenal sebagai keluarga ulama, namun kakeknya bernama Rabain dari pihak ayahnya adalah penjajar atau guru mengaji di Masjid Jami' Panyakalan, dan neneknya bernama Malan, dan kakek dari pihak ibu bernama Maliar dan neneknya bernama Mariama.¹³ Buya Gusrizal dikenal juga orang sangat sederhana dan bersahaja, ia selalu memakai surban dan tongkat dalam kegiatannya sehari-hari. Ia dikenal sangat tegas dalam permasalahan agama termasuk permasalahan tentang siloam, aksi 212, paham Islam Nusantara dan permasalahan syari'ah serta Buya Gusrizal merupakan orang sangat kritis terhadap orang merendahkan harkat martabat umat Islam.¹⁴ Buya Gusrizal menikah pada tahun 2000 dengan Yanti merupakan perempuan yang ia kenal saat kuliah di Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang. Sekarang mereka telah memiliki dua anak yakni Rayhan Adzkari dan Faiqa Dzakira. Sebagai pimpinan keluarga, Buya Gusrizal menekankan prinsip kepada keluarga sendiri agar hidup mandiri. Saat awal pernikahannya, keduanya sedang berkuliah di Pascasarjana UIN Imam Bonjol, pada waktu itu Buya Gusrizal mendapatkan beasiswa dan sang istri dengan biaya mandiri. Gaji hanya sebesar Rp 400.000 dan dikurangi Rp 100.000 untuk perjalanan ke Kerinci karena ia juga mengajar di sana, jadi hanya tersisa Rp 300.000 untuk kehidupannya selama satu bulan. Sebenarnya orang tuanya ingin membantu, tetapi dengan prinsipnya bahwa selama belum keadaan darurat, dia tidak ingin memintanya.¹⁵ Buya Gusrizal menyelesaikan pendidikan dasarnya di SD Inpres 3/76-6/78 di Panyakalan Solok pada tahun 1985. Selama masa SD, ia telah mendapatkan prestasi bagus sehingga memberikan kemudahan baginya untuk melanjutkan pendidikan ke SMP favorit di Solok. Namun, karena keinginannya mendalami ilmu agama lebih baik, maka ia memilih untuk melanjutkan pendidikannya di MTs Muhammadiyah Panyakalan Solok. Walaupun menurut pandangan orang kampung, bahwa belajar di MTs itu tidak ada apa-apanya dan sering dicemoohkan oleh masyarakat kampung. Namun, Buya Gusrizal tetap semangat untuk menuntut ilmu dan menyelesaikan SMP pada tahun 1988. Selanjutnya, ia melanjutkan pendidikan di MAPK Koto Baru-Padang Panjang, yang mana persaingan sangat ketat dan pelajarannya menggunakan bahasa Arab dan kitab *gundul*. Saat itu ancaman dari MAPK bahwa siswa tidak naik akan di *drop out* dan oleh sebab itu ia menjadi gigih belajar dan mendapat juara sampai selesai dan tamat pada tahun 1991.¹⁶ Setelah itu, Buya Gusrizal melanjutkan perkuliahannya di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Ia melaksanakan kuliah di sana atas beasiswa dari ICMI dan Majelis *al-Ala li Al-Syu'un al-Islamiyah*. Ia berhasil menyelesaikan program sarjana pada Fakultas Syari'ah wa al-Qanun, Universitas Al-Azhar Mesir pada tahun 1997.¹⁷ Setelah menyelesaikan sarjana, Buya Gusrizal ingin melanjutkan S2 Universitas Zamalik, akan tetapi karena belum ada beasiswa untuk S2 sekaligus di Al-Azhar sangat lama untuk

¹³ Gusrizal Gazahar (Ketua MUI Sumatera Barat), "Data Riwayat Hidup", *Wawancara Pribadi*, 23 Desember 2019.

¹⁴ Tim Penulis Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat, *Dari Buya Datuak Palimo...*, h. 141.

¹⁵ *Ibid.*, h. 152-153.

¹⁶ *Ibid.*, h. 143.

¹⁷ *Ibid.*, h. 143-144.

tamat. Akhirnya, ia memilih untuk mengambil program master di Zamalik Institut dan hanya sampai satu tahun saja karena adanya krisis moneter menimpa Indonesia sehingga mengharuskannya untuk pulang ke Indonesia. Ia sangat ingin melanjutkan program masternya di luar negeri yaitu di Aligar University India, karena ada beasiswa, sembari menunggu untuk keberangkatan, Buya Gusrizal melanjutkan kuliahnya dahulu di Pasca Sarjana IAIN Imam Bonjol Padang, atas usulan dari Nasrun Harun menyuruhnya untuk mengikuti tes di Pascasarjana IAIN Imam Bonjol Padang.¹⁸ Buya Gusrizal dikenal sebagai pakar di bidang fiqh dan ushul fiqh di Sumatra Barat. Ia mengatakan bahwa hasil pencapaiannya saat ini merupakan hasil dari pelajaran panjang didapatkannya di Universitas Al-Azhar, Mesir hingga ia menjadi ketua Majelis Ulama Sumatera Barat. Sejak sekolah di MAPK Koto Baru, Drs. Muhammad Nur adalah guru pertama memperkenalkan ilmu ushul fiqh tersebut kepadanya. Pengembangan dan pendalaman ilmu ini kemudian didapatkannya dari Rektor Al-Azhar Prof. DR. Abduh Fattah Husayniy al- Syaikh dan Dr. Ahmad Ali Thaha Rayyan. Prof. Dr. H. Amir Syarifuddin dan Prof. Dr. H. Nasrun Horoen juga berperan dalam memperkaya wawasan keilmuannya dalam bidang ushul fiqh.¹⁹ Selain itu, untuk ilmu fiqh, guru mempengaruhi keilmuannya didapatkan dari Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar yaitu Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Prof. Dr. Nasr Farid Muhammad Washil. Ilmu fiqh juga dipelajarinya melalui *halaqah* Syaikh Sayyid Sabiq pengarang *Fiqh al-Sunnah* dan murajaah langsung kepada Ketua Lajnah Fatwa Al-Azhar digelar *Malik al-Fatwa* (Raja Fatwa) yaitu Syaikh Athiyah Shaqr. Sekian banyak para guru (*masyayikh*) dikunjungi dan diikuti oleh Buya Gusrizal dalam pengembaraan mencari ilmu, tanpa mengecilkan peran guru, dia mengakui paling berpengaruh mengembangkan *mawhibah* (talenta) ilmiah dia adalah Syaikh Ismail al-Adawiy dan Syaikh Athiyah Shaqr. Sedangkan *Fiqh al-Sirah* ini adalah di antara ilmu berada di luar konsentrasi formal perkuliahan dan sangat disukai oleh Buya Gusrizal. Syaikh Muhammad Al-Ghazali merupakan ulama Mesir ditemui oleh Buya Gusrizal untuk mempelajari lebih dalam ilmu ini.²⁰ Buya Gusrizal merupakan pendakwah aktif di Sumatra Barat. Dia mendirikan surau sekaligus sebagai imam dan guru di sana. Dengan suraunya, dia mengkampanyekan ‘gerakan ulama baliak basurau’ artinya gerakan ulama kembali ke surau. Gerakan tersebut untuk menghasilkan reformasi Pendidikan di Sumatra Barat sebelum Gerakan Padri pada abad ke-19 M, ketika ulama merupakan bagian dari surau. Dia termasuk orang aktif dalam media sosial seperti Facebook dan secara rutin menuliskan sesuatu, menjawab setiap komentar, juga membagikan beberapa gagasan dari pemikirannya. Sebagai seorang ulama, dia sering memberikan kutipan-kutipan, terjemahan-terjemahan, dan interpretasi-interpretasi dari Al-Qur’an dalam rutinitasnya di akun Facebooknya. Dia membagikan audio ceramah-ceramahnya. Dia juga menulis pemikiran-pemikiran dan nasehat-nasehat dari agama Islam. Dia mengutip Al-Qur’an, terjemahannya, dan memberikan beberapa penjelasan kepada para pengikutnya. Topik-topik dibahas seputar kekhawatiran di lingkungan sosial-keagamaan dalam masyarakat. Dia juga sering cepat-tanggap terhadap berbagai isu-isu aktual.²¹ Buya Gusrizal mengagaskan semboyan ‘ulama bersurau’ dalam artinya ulama mengambil satu tempat ibadah untuk bisa membina umat. Ia juga merupakan satu-satunya dari kalangan ulama memiliki surau besar diberikan oleh masyarakat dengan nama Surau Buya Gusrizal Gazahar di jalan Bypass, Loweh, Mandiangin, Koto Selayan, Kota Bukittinggi. Surau ini berkapasitas sangat besar dan memiliki fasilitas-fasilitas memadai.

¹⁸ *Ibid.*, h. 145.

¹⁹ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Gusrizal_Gazahar. Diakses Tanggal 09 November 2019

²⁰ Tim Penulis Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat, *Dari Buya Datuak Palimo Kayo...*, h. 146-147

²¹ Fadhli Lukman, “Digital Hermeneutics and a New Face of the Qur’an Commentary”, *Al-Jami’ah*, Vol. 56, No. 1, 2018, p. 95-120, h. 101, doi 10.14421/ajis.2018.561.95-120,

Gaya Kepemimpinan Buya Gusrizal Gazahar

Menurut Buya Gusrizal, pola kepemimpinan terbentuk apabila fungsi dan peran lembaga ditentukan oleh keteraturan lembaga itu sendiri, jika fungsi dan peran lembaga tidak teratur, maka fungsi dan peran lembaga tidak bisa terlaksanakan. Setiap lembaga harus memiliki aturan untuk membentuk fungsi dan peran lembaga, dan hal harus dibentuk pertama kali pada lembaga yaitu keorganisasian kuat, supaya organisasi tersebut mampu melaksanakan tupoksi dan perannya. Kemudian, memahami fungsi dan peran Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat. Peran Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat hanya mempunyai peran tambahan selain sebagai organisasi Majelis Ulama telah dibimbing oleh pedoman dasar dan pedoman rumah tangga dari Lembaga pusat. Peran tambahannya adalah harus menjaga nilai-nilai dalam masyarakat Minangkabau. Karena dia tidak bisa menghindari dari nilai-nilai kultural-religius dari Minangkabau. Terakhir, memperhatikan dan memperbaiki dari kepemimpinan terdahulu untuk koreksi masa kepemimpinan sekarang.²² Empat pilar pola kepemimpinan Buya Gusrizal Datuak Palimo Basa sebagai ketua Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat yaitu: menjaga independensi Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat, menjadikan Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat harus mengakar kepada umat, menjaga solidaritas Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat dan menjaga nilai-nilai falsafah Minangkabau yakni “Adat Basandi Syara’ Syara Basandi Kitabullah”. Sejak reformasi dan kembali pada sistem pemerintahan nagari, pelaksanaan prinsip “Adat Basandi Syara’, Syara Basandi Kitabullah” belum tampak baik dari sebelumnya. Bahkan pada era globalisasi, pelaksanaan “Adat Basandi Syara’, Syara Basandi Kitabullah” mengalami penurunan. Kelas elit dari Minangkabau seperti *niniak mamak, ulama, cadaiak pandai, dan bundo kanduang* sebagai *ampek jinih*, kewibawaan mereka telah menurun dalam masyarakat Minangkabau. Begitu juga dengan kewibawaan orang tua, pemimpin pemerintahan dari eksekutif, dan legislatif. Berbagai penyimpangan dan pelanggaran terjadi dalam perilaku masyarakat Minangkabau.

Kondisi di atas juga membuat Buya Gusrizal berhasrat untuk mengembalikan nilai-nilai falsafah Minangkabau “Adat Basandi Syara’ Syara Basandi Kitabullah” masuk ke kembali ke masyarakat. Karena falsafah tersebut telah terjaga sejak dahulu dan telah hidup di dalam masyarakat Minangkabau dari para pendahulu masyarakat Minangkabau dan falsafah itu harus dilaksanakan dan diterapkan oleh pemimpin. Menurut Nurahman, Buya Gusrizal memiliki banyak karakter dan karakteristik sejatinya pada dirinya yaitu sosok Datuak Palimo Kayo. Hal itu menyebabkan dirinya menjadi pemimpin tegas, kemudian ia juga belajar sifat tegas dan berani tersebut dari Buya Hamka seperti larangan pengucapan Natal. Kemudian hal mempengaruhi karakter tegasnya didapatkan dari Muhammadiyah, karena dia memang berasal dari Mts Solok Muhammadiyah.²³ Menurut Yasmadi, Buya Gusrizal merupakan pemimpin sangat tegas, objektif, istiqamah, konsistensi dan independen. Ia merupakan orang tidak mau di dikte atau diperintah oleh pemerintah, namun ia sangat inklusif terhadap permasalahan agama. Jika muncul suatu permasalahan keagamaan di masyarakat, ia selalu merespon dengan i’tikad sosiologi-agama, seperti permasalahan narkoba, aqidah yang harus tetap dalam disiplin prinsip dan lurus sesuai dengan syari’at.²⁴ Menurut Ulfatmi, ia merupakan sosok tegas dan konsisten terhadap kepemimpinannya di Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat. Buya Gusrizal bisa memberikan keyakinan pada masyarakat terhadap Majelis Ulama Indonesia

²² Gusrizal Gazahar (Ketua MUI Sumatera Barat), “Data Riwayat Hidup”, *Wawancara Pribadi*, di Mesjid Nurul Iman, 28 November 2019.

²³ Nurahman (Anggota MUI Sumatra Barat), “Gaya Kepemimpinan Buya Gusrizal Gazahar”, *Wawancara Pribadi*, di Gedung Dakwah Muhammadiyah, 26 Desember 2019.

²⁴ Yasmadi (Ketua Bidang Pendidikan), “Gaya Kepemimpinan Buya Gusrizal Gazahar”, *Wawancara Pribadi*, di Gedung Rektorat UIN Imam Bonjol Padang, 17 Januari 2020.

Sumatera Barat, seperti masyarakat berkenan memberikan bantuan dan pendanaan setiap kegiatan Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat. Karena Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat memang tidak diberikan dana lagi dari APBD (anggaran pendapatan belanja daerah).²⁵ Menurut Yufni Faisol, Buya Gusrizal merupakan insan tegas sebagai pemimpin, konsisten dalam penyampaian kebenaran, tetap pendirian dalam keputusannya, amanah dan cerdas. Ia merupakan orang cerdas dan bijaksana sebagai ketua Majelis Ulama Indonesia bagian Sumatera Barat. Misalnya, kalau ada orang memberikan donasi kepada Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat melaluinya secara langsung, maka ia pasti menginformasikan kepada bendahara dan memberikannya langsung kepada bendahara. Buya Gusrizal merupakan orang dengan konsistensi terhadap pemikiran yang sesuai dengan ajaran Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadits. Kalau muncul suatu tidak sesuai dengan ajaran Islam maka ia akan melakukan tindakan tegas.²⁶ Buya Gusrizal memiliki peran dalam pencetusan kembali isi 'Sumpah Sakti Marapalam' dilaksanakan di Kota Padang Panjang, sehingga memberikan dampak positif dalam pengukuhan itu seperti nagari-nagari agar semangat untuk mengadakan agenda-agenda pengkajian dan pembinaan adat dan hukum adat serta untuk mengembalikan eksistensi nilai-nilai adat tersebut di Minangkabau berdasarkan falsafah "Adat Basandi Syara' Syara Basandi Kitabullah".²⁷

Kontribusi Buya Gusrizal Gazahar Remanajemen Organisasi dan Finansial Mandiri MUI Sumbar

Saat Buya Gusrizal menjadi ketua Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat, ia mendapatkan banyak masalah seperti masyarakat menganggap tidak layak kalau Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat dipimpin oleh kalangan masih muda. Biasanya Majelis Ulama Indonesia dipimpin oleh ulama sepuh. Koordinasi dengan para pengurus juga menjadi faktor penghambat karena aktivitas mereka yang cukup padat, seperti tugas-tugas kepegawaian dan lain-lainnya. Ketika ia ingin mengembalikan MUI kepada umat, hal itu merupakan tantangan berat, karena sebagian masyarakat menganggap bahwa Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat merupakan bagian pemerintah. Padahal, MUI adalah organisasi independen, oleh sebab itu, ia terus menjaga keberadaan MUI sebagai wakil umat, untuk menyampaikan aspirasi umat kepada pemerintah dan dalam rangka untuk menyampaikan kepada umat kebijakan pemerintah sesuai dengan ajaran Islam. Buya Gusrizal membuat motto dalam kepemimpinannya yaitu "*Membawa Izzah Menyandang khidmah*" (membawa kewibawaan keulamaan dan menyandang tugas keumatan).²⁸ Motto ini bermakna bahwa Majelis Ulama Indonesia tidak boleh direndahkan atau dikendalikan oleh kepentingan politik, karena itu Buya Gusrizal tetap memiliki prinsip apabila ada penyimpangan dari pemerintah, ia akan tetap mengawasi walaupun memiliki resiko terhadapnya. Perannya mengembangkan MUI dan menyakinkan kepada masyarakat bahwa lembaga ini merupakan wadah untuk menjaga umat dan untuk mempertahankan kemurnian ajaran Islam seperti pepatah Minangkabau "Adat basandi syara' syara basandi Kitabullah". Buya Gusrizal memerankan fungsi Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat cukup berjalan baik dalam pengoordinasian dengan cabang-cabang

²⁵ Ulfatmi Amirsyah (Ketua Pemberdayaan Perempuan), "Peran Buya Gusrizal Gazahar di MUI Sumbar", *Wawancara Pribadi*, di Gedung Rektorat UIN Imam Bonjol Padang, 17 Januari 2020.

²⁶ Yufni Faisol (Bendahara Umum MUI Sumatera Barat), "Gaya dan Peran Keagamaan Buya Gusrizal Gazahar", *Wawancara Pribadi*, di Ruang Dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Imam Bonjol Padang, 17 Januari 2020.

²⁷ Zulhamdi (Ketua MUI Padang Panjang), "Peran Buya Gusrizal Gazahar di MUI Sumbar", *Wawancara Pribadi*, di MAN Koto Baru.

²⁸ Gazahar (Ketua MUI Sumatera Barat), "Data Riwayat Hidup".

MUI pada tingkat kabupaten dan kota. Solidaritas organisasi cukup kuat dengan dukungan MUI dari tingkat Kabupaten dan Kota. Kemudian, kepemimpinan itu dapat dilihat dari dua hal, yaitu manajemen terhadap program-program dalam rapat kerja walaupun tidak semua terlaksanakan karena keterbatasan waktu dari masing-masing bidang, seperti undangan rapat kepengurusan itu mengalami kesulitan. Sehingga rapat-rapat untuk koordinasi agak sulit terlaksana, tetapi kegiatan tetap ada. Beberapa kegiatan dilaksanakan seperti kegiatan *muzakarah* adalah kegiatan membahas tentang permasalahan-permasalahan masyarakat atau persoalan umat saat itu atau masa tertentu yang perlu ada pemecahan masalahnya dibahas dalam *muzakarah* dan untuk menetapkan fatwanya. *Muzakarah* daerah-daerah membicarakan peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian lokal, seperti permasalahan masyarakat. Kemudian, rapat koordinasi menghadirkan Majelis Ulama Indonesia tingkat kabupaten dan kota dengan rapat untuk agenda-agenda tertentu seperti persoalan-persoalan daerah tingkat provinsi atau nasional yang diselesaikan dengan empat koordinasi, selain juga untuk memperkuat konsolidasi untuk menyamakan erat, menyamakan langkah, menyamakan persepsi antar pengurus Majelis Ulama Indonesia. Kemudian MUI Sumbar memiliki relasi eksternal cukup intens dengan pemerintah daerah. MUI mendukung program-program daerah, seperti pembahasan tentang kurikulum budaya Minangkabau pada sekolah, dan pemberian sertifikat halal terhadap produk-produk baru.²⁹ Saat pertama kali ia diberikan amanah sebagai ketua Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat. Ia merasakan kerumitan dalam finansial Lembaga tersebut, karena lembaga tersebut memiliki hutang dan krisis finansial. Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat mampu bergerak ke permukaan masyarakat namun terkendala oleh beberapa permasalahan terutama dalam pendanaan. Sejak itu, Buya Gusrizal berusaha untuk mengembalikan Majelis Ulama Indonesia Sumatra Barat kepada umat dengan tidak lagi bergantung kepada dana pemerintah dari APBD (anggaran pendapatan belanja daerah). Permasalahan finansial tersebut dapat diselesaikan setelah masyarakat meminta MUI untuk membuka rekening dan hingga sekarang, rekening tersebut diisi oleh masyarakat untuk menggerakkan Majelis Ulama Indonesia. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kepedulian dengan MUI dalam lingkungan Masyarakat.³⁰ Buya Gusrizal juga berkontribusi secara finansial dalam ide untuk memajukan Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat. Ia mampu menanggulangi dana tidak lagi dari APBD (anggaran pendapatan belanja daerah), karena MUI Sumbar mendapatkan bantuan finansial dari masyarakat atau donatur dalam negeri bahkan hingga dari Australia.³¹

Penggagas LPPOM MUI dan QRIS BAZNAS Daerah

Menurut Ulfatmi, kontribusinya dalam Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat yaitu mengembalikan nilai-nilai dalam falsafah Minangkabau yaitu “Adat Basandi Syara’Syara Basandi Kitabullah” agar masyarakat dan para ulama tidak melepaskan diri dari Al-Quran dan Hadits. Kalau ada antara masyarakat dan para ulama melenceng dari ajaran Al-Quran dan Hadits, maka ia akan memberikan reaksi terhadap permasalahan tersebut. Buya Gusrizal juga berperan dalam pembentukan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, Minuman dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Sumatera Barat. LPPOM bertujuan untuk mengkaji produk-produk pangan, obat dan kosmetik dengan label halal untuk beredar pada lingkup masyarakat, yaitu Sertifikasi Halal. Tujuan penyelenggaraan sertifikasi halal pada produk pangan, obat-obat dan kosmetika yaitu untuk memberikan kepastian halal

²⁹ Faisol (Bendahara Umum MUI Sumatera Barat)...

³⁰ Tim Penulis Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat, *Dari Buya Datuak Palimo Kayo...*, h. 157-158.

³¹ Marwan Lubis, (Kepala Sekretariat), “Kontribusi Buya Gusrizal Gazahar di MUI Sumbar”, *Wawancara Pribadi*, di Mesjid Nurul Iman, 17 Januari 2020.

terhadap suatu produk, sehingga mampu menentramkan batin bagi para konsumennya dan juga sebagai alat promosi suatu produk.³² Buya Gusrizal menyebutkan pada era kontemporer telah banyak muncul aplikasi memudahkan para *muzakki* atau pemberi untuk menyalurkan zakat mereka. Kemudahan tersebut dapat disalurkan melalui sistem *Quick Response Code Indonesia Standard* (QRIS) sebagaimana gencar disosialisasikan oleh Bank Indonesia (BI). Ia menegaskan bahwa jangan sampai penyaluran dana zakat, infak, sedekah ini kepada masyarakat miskin (*mustahiq*) malah menularkan kemiskinan. Program zakat tersebut harus membuat para *mustahiq* sebagai *muzakki* dalam beberapa waktu ke depan, hal ini disampaikannya saat seremonial peresmian fungsional QRIS terhadap penerimaan zakat, infak, dan sedekah pada Baznas Provinsi Sumbar dan Masjid Raya Sumbar. Ia berpandangan bahwa selama ini banyak memppunyai asumsi tentang pemanfaatan dana umat dari zakat, infak, dan sedekah itu untuk membantu masyarakat miskin dalam kebutuhan pangan mereka, akan tetapi seharusnya dana tersebut memiliki potensi besar untuk dimanfaatkan dalam pengelolaan dan peningkatan ekonomi masyarakat supaya finansial umat itu dapat mengentaskan kemiskinan bagi sebuah daerah.³³

Pelarangan LGBT, Hari Valentine, Pemahaman dan Aliran Sesat di Sumbar

Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat melaksanakan kerjasama dengan pihak gubernur Sumbar dalam pembinaan umat. Pertemuan dilaksanakan di rumah dinas gubernur dalam agenda rapat koordinasi daerah (rakorda) Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat akan diselenggarakan pada 19-21 Juli 2019 dan membahas permasalahan terbaru dalam masyarakat. Buya Gusrizal menyampaikan bahwa rakorda itu adalah agenda tahunan Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat yang seharusnya diagendakan dua bulan sebelumnya, akan tetapi karena momentum pemilu serentak pada tahun 2019, akhirnya dilaksanakan pada 19-21 Juli 2019, dan mendiskusikan penguatan organisasi internal dengan wacana pembentukan Majelis Ulama Indonesia hingga ke level bawah bahkan pada tingkat nagari dan jorong serta agenda prioritas lainnya untuk menyikapi isu penerapan pengukuhan ‘Sumpah Sati Marapalam’. Buya Gusrizal bersama peserta rakorda membahas permasalahan isu *Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender* (LGBT) masuk ke lingkungan masyarakat dan memunculkan ide untuk mengatur sanksi dan larangan LGBT berkembang di lingkungan masyarakat. Mereka juga membahas isu Islam Nusantara dengan asumsi bahwa pengaplikasiannya terdapat nilai pluralisme agama dan Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat dengan tegas menolak paham Islam Nusantara masuk ke Sumatra Barat serta dibutuhkan langkah-langkah konkrit untuk mengantisipasinya. Berbagai respon terhadap isu LGBT di Sumatra Barat bisa dilihat dari beberapa representasi pemberitaan media terhadap respon dari pemerintahan, kelompok masyarakat, dan pemimpin keagamaan serta lain sebagainya. Penolakan LGBT secara intensif disampaikan oleh Majelis Ulama Sumatra Barat, Buya Gusrizal sebagai ketuanya mendeklarasikan bahwa kelompok mereka berlawanan dengan fenomena tersebut. Mereka mengutuk segala perihal lesbian, gay, sodomi, dan penyalahgunaan seksual dalam berbagai bentuk dan alasan. Kedua, MUI Sumatra Barat bertekad untuk melawan fenomena tersebut dengan memobilisasi potensi masyarakat dan melakukan pemugaran pemahaman Islam kepada madrasah kalangan anak-anak. IKADI Sumatra Barat juga mendeklarasikan hal serupa dan melakukan antisipasi dengan penyadaran terhadap masyarakat melalui para da’i, ceramah-ceramah dan para dosen. MUI Kota Padang juga melakukan hal sama dan melawan penyakit ataupun legalisasi LGBT di lingkungan masyarakat kota tersebut karena LGBT dan

³² Amirsyah (Ketua Pemberdayaan Perempuan)...

³³ Ani Nursalikhah, 15 Januari 2020, <https://www.msn.com/id-id/berita/nasional/mui-sumbar-pengeolah-zakat-harus-ubah-mustahik-jadi-muzakki/ar-BBYVXqp> Akses 19 Januari 2020

sejenisnya menjadi sebuah kejahatan dalam agama, adat, hukum dan kemanusiaan, tentunya harus dilakukan antisipasi terhadap fenomena tersebut.³⁴ Oposisi LGBT dari masyarakat Minangkabau dapat dilihat dari beberapa laporan dan respon dari pemerintah daerah tersebut terhadap fenomena LGBT di Sumatra Barat. Gubernur Sumatra Barat mengatakan bahwa eksistensi LGBT bagi masyarakat Minangkabau bukan bagian dari filosofi tradisi kebudayaan dan agama orang Minangkabau. Nasrul Abit sebagai wakil gubernur Sumatra Barat juga mengatakan bahwa LGBT tidak sesuai menurut falsafah Minangkabau dan agama Islam. Orang Minangkabau telah memiliki sendiri adat-istiadat dan keagamaan setiap hari. Nasrul Abit mengatakan bahwa kelompok LGBT cocok untuk meninggalkan Sumatra Barat. Sekretaris daerah Sumatra Barat juga mengatakan bahwa jika LGBT di wilayahnya adalah sebuah dosa. Dia mengatakan butuh memberikan aturan dan sanksi terhadap kelompok tersebut.³⁵ Buya Gusrizal bersama Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat telah menetapkan keharaman perayaan 'Hari Valentine' diartikan sebagai 'hari kasih sayang'. Ia menilai bahwa 'Hari Valentine' tidak memenuhi unsur kasih sayang, namun dimaknai hari nafsu dan hidup bebas tanpa nilai-nilai religius. Fatwa haram tersebut diikuti juga oleh gubernur Sumatera Barat melarang perayaan 'Hari Valentine' dan wali kota Padang yakni Mahyeldi Ansharullah serta wali kota Payakumbuh yaitu Riza Fahlevi ikut melarang warganya untuk tidak ikut merayakan hari tersebut.³⁶ Buya Gusrizal berkontribusi dalam meluruskan pemahaman masyarakat agar tidak merendahkan aqidah dalam Islam, seperti fatwa pemakaian kata 'neraka', 'setan', 'iblis' terhadap produk makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, dan pakaian. Pengeluaran fatwa tersebut memiliki alasan bahwa pemakaian kata-kata itu akan menghilangkan kewaspadaan masyarakat terhadap agama, seolah-olah memperolok-olok 'neraka' yang notabenehnya wajib diimani dan ditakuti oleh umat Islam. Buya Gusrizal mengatakan, hal-hal itu seharusnya menimbulkan kecemasan atau mawas diri bagi para penganut Islam, seandainya dibiarkan itu terjadi, secara perlahan-lahan akan menghilangkan rasa ketakutan terhadap neraka tersebut. Fatwa tersebut dikeluarkan juga setelah laporan dari masyarakat meminta tanggapan Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat atas nama-nama produk menggunakan kata 'neraka', 'setan' dan lainnya. Buya Gusrizal juga mengungkapkan fatwa tersebut juga dikeluarkan setelah pelaksanaan diskusi bersama dengan Majelis Ulama Indonesia tingkat Kota Padang.³⁷ Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat masa kepemimpinan Buya Gusrizal juga meminta pemerintah segera merespon terhadap Islam Moga telah berkembang di Kota Payakumbuh dan Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Berdasarkan keputusan dari MUI di sana bahwa aliran itu dinyatakan masuk kategori sesat dan dilarang untuk melakukan aktivitas di masyarakat, hal itu dilakukan supaya menghindari konflik antar warga. Indikasi kesesatan ajaran tersebut yaitu para jamaahnya meyakini bahwa guru mereka sebagai raja para jin, dan mereka juga mempelajari praktik perdukunan dan ilmu kebatinan di luar nalar.³⁸

Penolakan Pendirian RS Siloam di Padang

Buya Gusrizal Gazahar pernah memimpin penolakan super Blok Siloam di Kota Padang dan berakhir dengan pembatalan pendirian rumah sakit Siloam dan sekolah Kristen Pelita

³⁴ Mufdil Tuhri, "Religion, Media, and Moral Panic, Challengin Homonormativity in Minangkabau People 2016-2017", *SOSHUM*, vol. 11, no. 3, 2021, p. 226-235, h. 233.

³⁵ *Ibid.*, h. 233-234.

³⁶ Sri Wahyeni, 12 Februari 2016, <http://www.valora.co.id/m/?mod=berita&id=3032> Akses 19 Januari 2020.

³⁷ Riskyan Adiyudha, 02 Oktober 2019, <http://m.republika.co.id/amp/pyqqz9313>

³⁸ Eri Naldi, VIVA.co.id, 17 Februari 2011, [https://uc.xyz/11QPZH?pub=link\[#LINK_TEXT#\]](https://uc.xyz/11QPZH?pub=link[#LINK_TEXT#])bagus Akses 19 Januari 2020.

Harapan. Saat itu, Majelis Ulama Indonesia Sumatra Barat mengalami keraguan untuk memberikan sikap terhadap perkara tersebut. Karena rencana itu telah disetujui oleh Walikota Padang saat itu, namun Buya Gusrizal tetap kokoh terhadap prinsipnya untuk melawan keputusan itu, karena ia berpandangan bahwa keberadaan kompleks tersebut mempunyai misi untuk melaksanakan kristenisasi di Padang. Akibatnya, ia mengalami kesulitan dan ancaman dari berbagai pihak seperti permasalahan kehadirannya menjadi dosen sehingga ia harus berada di kampus dari pukul 07:30 sampai 16:00, tentu saja hal ini merupakan perihal aneh karena pada saat itu semua dosen tiada seperti itu dan saat ia mengadukan kepada inspektorat dan mempertanyakan penyebab hanya dia dituntut dan respon dari inspektorat bahwa ia saja mendapatkan pengaduan.³⁹ Akibat penolakan itu juga, menimbulkan gesekan dengan pihak pemerintah, hingga ia mendapatkan tekanan dari rektor UIN Imam Bonjol saat itu. Ia ditekan dan dihambat untuk melakukan tindakan perlawanan kepada pemerintah hingga diadukan kepada Kementerian Agama dengan alasan bermacam-macam, seperti ia pernah dituduh menjalankan ibadah haji menggunakan KTP palsu, padahal itu semua hanyalah kebohongan saja dan tidak sesuai dengan fakta.⁴⁰ MUI Kota Padang memiliki afiliasi kuat dengan MUI Sumbar untuk memutuskan berbagai perkara kontemporer terjadi di lingkungan masyarakat. Sebagai lembaga pemerintah, fungsi MUI untuk melakukan mediasi, transformasi dan konsultasi antara umat Islam dengan pihak birokrasi publik. Internal MUI diisi oleh sejumlah berbagai macam perwakilan ormas Islam. MUI adalah lembaga netral dalam menyikapi setiap isu terkait dalam kepentingan umat Islam di Indonesia dan pihak pemerintahan.⁴¹ MUI Kota Padang pernah memberikan komentar bertolak belakang dengan MUI Sumbar terkait polemik terjadi di Sumatera Barat pada isu misi kristenisasi di RS Jantung dan Stroke di Bukittinggi dan Kepulauan Mentawai. Masyarakat Kota Padang pernah mendemonstarasi RS Yos Sudarso untuk mencegah isu tersebut akan terealisasi. Kondisi tersebut tentu mengindikasikan bahwa penduduk Sumbar sangat traumatik dan sensitif pada isu-isu kristenisasi melalui pendirian RS Siloam untuk menciptakan lapangan kerja dan menyerap lapangan pekerjaan. Polemik di atas ikut dikomentari oleh Ketua MUI Kota Padang bernama Duski Samad menyampaikan bahwa MUI merupakan lembaga mediasi antara umat dengan pemerintah dan tidak wadah gerakan politik.⁴² Ia memberikan komentar tersebut disebabkan oleh pihak MUI Sumatra Barat memberikan maklumat melarang dan memprotes secara keras kehadiran RS Siloam tersebut dikhawatirkan ada kristenisasi di Kota Padang.

Penguatan Perda Syari'ah

Penerapan Perda Syariah di wilayah Sumatra Barat mendapatkan dukungan penuh dari Majelis Ulama Indonesia Sumatra Barat. Buya Gusrizal, memberikan penilaian keharaman untuk memilih partai politik menolak perda-perda atas asas syariat Islam. Buya Gusrizal juga menceritakan bahwa pada tahun 1997, ia pulang dari Mesir dan langsung terjun berjuang di medan dakwah dengan cara-cara sah dan sesuai dengan aturan di Indonesia. Membuat peraturan daerah (perda) atas asas syariat Islam, bagi Buya Gusrizal merupakan langkah percobaan untuk menghidupkan nilai-nilai moralitas agama terhadap bangsa ini. Buya Gusrizal juga menyatakan bahwa perjuangan panjang dan berat terjadi padanya sejak dari Solok hingga terus berjalan sampai hari ini dan terhitung 21 tahun hingga tahun 2018. Penegakan perda-perda syariat tersebut diterapkan atas landasan kecintaan kepada Allah *subhanahu wa ta'ala* dan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* yang diwujudkan dalam pembangunan jiwa anak bangsa ini. Semua penegakan Perda

³⁹ Tim Penulis Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat, *Dari Buya Datuak Palimo Kayo...*, h 139-151.

⁴⁰ *Ibid.*, h. 150

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Ibid.*

Syariat itu dilaksanakan tetap dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).⁴³ Sebelumnya, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie menyatakan bahwa PSI tidak akan pernah mendukung perda-perda Injil atau perda-perda Syariah. Hal ini diungkapkan Grace Natalie pada peringatan hari ulang tahun keempat PSI, di BSD, Tangerang, Ahad. Menanggapi pernyataan Grace Natalie itu, Buya Gusrizal mengungkapkan bahwa jika penyampaian ketua PSI itu benar, maka Buya Gusrizal sebagai ketua MUI Sumbar menyerukan kepada seluruh umat Islam di negeri ini, terkhusus di wilayah Minangkabau, dinyatakan haram untuk memilih partai atau siapapun diusung oleh partai itu. Buya Gusrizal juga menjelaskan bahwa perda syariah justru membuat perubahan ke arah menuju lebih baik daripada sebelumnya. Selain itu, Buya Gusrizal mengatakan bahwa tidak ada konstitusi dilanggar dan tidak ada umat agama lain mendapatkan kerugian akibat penerapan perda-perda tersebut. MUI Sumbar memang pendukung utama terhadap eksistensi Perda-Perda Syariah di wilayah Sumatra Barat. Hal ini tidak bisa dihindari dari eksistensi MUI memiliki pengaruh sangat kuat di provinsi Sumatra Barat dibandingkan dengan ormas-ormas Islam lainnya.⁴⁴

Simpulan

Secara historis, Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat telah terbentuk sebelum pendirian Majelis Ulama Indonesia Pusat. Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat terbentuk pada tahun 1968, sedangkan Majelis Ulama Indonesia Pusat berdiri pada tahun 1971. Kemudian, Buya Gusrizal Gazahar dilahirkan pada 13 Agustus 1973 di Nagari Panyakalan, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat. Dia merupakan anak pertama dari tiga saudara, ayahnya bernama H. Gazahar, dan ibunya bernama Hj. Marlina. Ia tamatan SD Inpres 3/76-6/78 Panyakalan Solok pada tahun 1958, tamat Mts Muhammadiyah Panyangkalan Solok pada tahun 1988, tamat di MAPK Koto Baru-Padang Panjang pada tahun 1991. Kemudian ia melanjutkan studi sarjana di Universitas Al-Azhar dan masternya di UIN Imam Bonjol Padang. Buya Gusrizal Gazahar bergabung ke dalam Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Solok sejak tahun 1997. Kemudian ia bergabung ke dalam Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat pada tahun 2006 dengan amanah sebagai Ketua Komisi Fatwa. Gaya kepemimpinan Buya Gusrizal Gazahar dinilai prestisius dalam Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat, karena ia memiliki sifat tegas, konsisten, jujur, cerdas dan bertanggung jawab dalam kepemimpinannya di Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat. Kontribusinya di Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat tidak hanya dalam hal finansial saja, namun juga dalam hal intelektual dan pembangunan kepercayaan dalam masyarakat terhadap MUI Sumbar, seperti masyarakat berkenan memberikan donasi kepada Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat dalam setiap agenda Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat. Buya Gusrizal juga memiliki ide-ide transformatif internal lembaga dari tingkat provinsi hingga daerah, ia juga selalu tegas dalam pemberian sikap terhadap isu-isu kontemporer dan memberikan fatwa berdasarkan laporan masyarakat setelah dibahas dan dikaji secara terpadu bersama anggotanya.

Referensi

- Adiyudha, Riskyan. 2019. *Republika*. Oktober 02. <http://m.republika.co.id/amp/pyqqz9313>.
Alie, Imam Masykoer. 2003. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Dapertemen Agama.

⁴³ Gugun El-Guyanie dan Moh. Tamtowi, "Politik Legislasi Perda Syari'ah di Sumatra Barat", *Staatsrecht*, Vol. 1, No. 1, Juni 2021, p. 1-17, h. 5-6.

⁴⁴ *Ibid.*, h. 6.

- Amirsyah, Ulfatmi, interview by Nadia Oktaviadi. 2020 . *Peran Buya Gusrizal Gazahar di MUI Sumbar* (Januari 17).
- El-Guyanie, Gugun, and Moh. Tamtowi. 2021. "Politik Legislasi Perda Syari'ah di Sumatra Barat." *Staatsrecht* 1 (1): 1-17.
- Faisol, Yufni, interview by Nadia Oktaviadi. 2020. *Gaya dan Peran Keagamaan Buya Gusrizal Gazahar* (Januari 17).
- Gazahar, Gusrizal, interview by Nadia Oktaviadi. 2019. *Data Riwayat Hidup Padang*, (November 28).
- Gazahar, Gusrizal, interview by Nadia Oktaviadi. 2019. *Data Riwayat Hidup* (November 28).
- Kamal, Tamrin. 2006. *Purifikasi Ajaran Islam pada Masyarakat Minangkabau*. Padang: Angkasa Raya.
- Karim, Helmi. 1994. *Konsep Itjihad Majelis Ulama Indonesia dalam Pengembangan Hukum Islam*. Pekanbaru: Susqan Press.
- Lubis, Marwan, interview by Nadia Oktaviadi. 2020. *Kontribusi Buya Gusrizal Gazahar di MUI Sumbar* (Januari 17).
- Lukman, Fadhli. 2018. "Digital Hermeneutics and a New Face of the Qur'an Commentary." *Al-Jami'ah* 56 (1): 95-120. doi:10.14421/ajis.2018.561.95-120.
- Naldi, Eri. 2011. *VIVA.co.id*. Februari 17. Accessed Januari 19, 2020. [https://uc.xyz/11QPZH?pub=link\[#LINK_TEXT#\]bagus](https://uc.xyz/11QPZH?pub=link[#LINK_TEXT#]bagus).
- Nurahman, interview by Nadia Oktaviadi. 2019. *Gaya Kepemimpinan Buya Gusrizal Gazahar* (Desember 26).
- Nursalikah, Ani. 2020. *MSN*. Januari 15. Accessed Januari 19, 2020. <https://www.msn.com/id-id/berita/nasional/mui-sumbar-pengeolah-zakat-harus-ubah-mustahik-jadi-muzakki/ar-BBYVXqp>.
- Putra, Adi Syah. 2021. "Gaya Komunikasi Dinas Lingkungan Hidup dalam Menciptakan Kesadaran Bersih Lingkungan Masyarakat Kota Binjai." *Al-Manaj* 1 (2): 13-25.
- Rahmad, Imdadun. 2003. *Islam Pribumi Mendialogkan Agama Membaca Realitas*. Jakarta: Erlangga.
- Sarwan. 2015. *Trilogi Dakwah Hamka*. Padang: Imam Bonjol Press.
- Segaf, Husein. 1976. *Ulama dan Pembangunan*. Jakarta.
- Shamad, Irhash A. 2013. *Ulama-Ulama Syaifiyah di Pentas Sosial Keagamaan Minangkabau Akhir abad 19 hingga awal abad 20*. Padang: Imam Bonjol Press.
- Sulastri, Irta, Arifah Yenni Gustia, and Lesnita Juniati. 2020. "Penggunaan Media Sosial dalam Berdakwah, Studi terhadap Da'i di Kota Padang." *Al-Munir* 11 (2): 153-163.
- Tim Penulis Majelis Ulama Indonesia Sumatra Barat. n.d. *Dari Buya Datuak Palimo Kayo sampai ka Buya Datuak Palimo Basa (Catatan Biografi Ketua-Ketua Majelis Ulama Sumatra Barat)*. Padang: MUI Sumatra Barat.
- n.d. *Tirto.id*. <https://tirto.id/waketum-mui-pernyataan-ketua-mui-sumbar-bukan-sikap-sembaga-dagq>.
- Tuhri, Mufdil. 2021. "Religion, Media, and Moral Panic, Challengin Homonormativity in Minangkabau People 2016-2017." *SOSHUM* 11 (3): 226-235.
- Wahyeni, Sri. 2016. *Valora*. Februari 12. Accessed Januari 19, 2020. <http://www.valora.co.id/m/?mod=berita&id=3032>.
- n.d. *Wikipedia*. Accessed November 09, 2019. https://id.m.wikipedia.org/wiki/Gusrizal_Gazahar.
- Yasmadi, interview by Nadia Oktaviadi. 2020. *Gaya Kepemimpinan Buya Gusrizal Gazahar* (Januari 17).
- Zulhamdi, interview by Nadia Oktaviadi. n.d. *Peran Buya Gusrizal Gazahar di MUI Sumbar*